

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga kebutuhan akan pangan harus selalu terpenuhi dalam kondisi apa pun.¹ Indonesia yang merupakan negara berkembang, harus mampu memenuhi kebutuhan pangan untuk lebih dari 250 juta penduduk. Sebagai negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, namun Indonesia masih sering mengalami permasalahan pangan setiap tahunnya. Permasalahan pangan selalu menjadi fokus utama pemerintah Indonesia sering terjadi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, yang mana mayoritas penduduknya merupakan petani. Permasalahan-permasalahan pangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, kemiskinan, perubahan iklim, bencana alam, dan pengambilan kebijakan yang salah di bidang pertanian.² Permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari peta ketahanan dan kerentanan pangan Indonesia pada tahun 2015, terdapat 58 kabupaten kota dari 398 kabupaten dan kota di Indonesia rentan terhadap rawan pangan,³ Sedangkan menurut *Global Hunger Index* pada tahun 2017 Indonesia berada pada posisi 72 dari 119 negara.⁴

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

² Suryana Achmad, Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 32 No. 2, Desember 2014: 123 – 135

³ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015 (documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp276267.pdf?_ga=2.25832317.134744796.1520326323-671983688.1519880934, di akses 12 September 2018)

⁴ Global Hunger Index 2017 (<http://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2017.pdf>)

Untuk mengatasi permasalahan pangan, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kedaulatan pangan Indonesia, dengan cara sebagai berikut: mendorong peningkatan hasil tani, meningkatkan kesejahteraan petani dengan membangun infrastruktur pendukung sektor pertanian, pengadaan asuransi tani untuk mencegah kerugian petani apabila gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, serta meningkatkan upah buruh tani.⁵ Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2015 tentang kedaulatan pangan dan gizi, dimana ada peraturan tentang penetapan cadangan pangan dari tingkat desa, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Cadangan pangan bertujuan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya.

Isu kedaulatan pangan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1992, diprakarsai oleh para petani dari berbagai penjuru dunia yang merasa kecewa dengan konsep ketahanan pangan yang mendukung industrialisasi produk tani yang tidak relevan terhadap para petani, sehingga kebijakan yang muncul malah merugikan para petani. Ketahanan pangan dianggap hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa memikirkan darimana dan bagaimana pangan tersebut didapat, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain seperti kesejahteraan petani, lingkungan, dan budaya.⁶ Pada tahun 1996 di konferensi internasional *La Via Campesina Mexico*, muncullah konsep kedaulatan pangan, dimana setiap individu memiliki hak atas

⁵ Peningkatan Produktivitas untuk Wujudkan Ketahanan Pangan (presidenri.go.id/program-prioritas-2/1967.html di akses 22 Agustus 2018)

⁶ Wittman dkk., Food Sovereignty "Reconnecting Food, Nature and Community", Pambazuka Press, 2011, hlm2-4

akses pangan yang sehat dan tepat secara budaya, yang dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan serta berkelanjutan dan hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri.

Walaupun isu kedaulatan pangan telah ada dari tahun 1992, namun di Indonesia kedaulatan pangan baru muncul ketika kedaulatan pangan menjadi bagian dari Undang-Undang no.18 tahun 2012, “Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal”.⁷ Mewujudkan kedaulatan pangan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Indonesia tahun 2015-2019, yang juga menjadi salah satu program Nawa Cita ke 7 Presiden Joko Widodo.⁸

Kedaulatan pangan merupakan salah satu bentuk dari 17 tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang berfokus di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesetaraan, perubahan iklim, perdamaian dan keadilan.⁹ Kedaulatan pangan yang merupakan SDGs no.2 yakni *Zero Hunger* bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Ada tiga Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang bertugas untuk mewujudkan *Zero Hunger 2030*, yakni World Food Program (WFP), Food and Agricultural Organization (FAO), dan International Fund for Agricultural Development

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

⁸ Syahyuti, dkk, *Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan pangan Nasional*. Forum Penelitian Agro ekonomi, Vol. 33 No. 2, Desember 2015: hlm 99

⁹ SDGs 9 (<http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>, di akses 13 Agustus 2018)

(IFAD). Dari tiga organisasi internasional di bidang pangan, WFP merupakan organisasi yang memiliki program dengan cakupan paling luas dibandingkan dua organisasi internasional lainnya dan juga menjadi organisasi internasional terdepan dalam mewujudkan *Zero Hunger*.¹⁰

World Food Program (WFP) merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB di bidang kemanusiaan yang berfokus mengatasi kelaparan di seluruh dunia, dibentuk pada tahun 1963 dan berada di bawah pengawasan *Food and Agricultural Association* (FAO). Saat ini WFP memiliki kantor perwakilan yang berada di 80 negara, termasuk di Indonesia. WFP adalah organisasi yang berkomitmen untuk mewujudkan *Zero Hunger* sebagai SDGs no 2 yang bertugas mengatasi kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tugas WFP berfokus pada program pemberian bantuan dalam keadaan darurat, program pemberian bantuan dan rehabilitasi, program bantuan pengembangan dan program tugas khusus. Saat ini WFP lebih banyak bertugas di wilayah-wilayah rawan konflik seperti di Afrika dan Timur Tengah.¹¹

Indonesia sebagai negara berkembang yang masih berupaya mengatasi permasalahan pangan seperti kelaparan dan malnutrisi telah bekerja sama dengan WFP lebih dari 40 tahun, dan di Indonesia telah ada kantor perwakilan WFP di Jakarta dan Papua. Salah satu bentuk bantuan WFP di Indonesia adalah *Emergency Operation* pada tahun 1998 dan program *Protracted Relief and*

¹⁰ FAO, WFP & IFAD Aid-Funded Business Factfile di akses pada 5 januari 2019 (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300350/FAO_WFP_IFAD_Fact_file.pdf)

¹¹ Overview (www1.wfp.org/overview, di akses 22 September 2018)

Recovery Operation (PRRO) yakni berupa program pembagian beras bersubsidi bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan Surabaya, yang pada saat itu mengalami rawan pangan. Program Bantuan WFP di Indonesia berlanjut dengan bantuan-bantuan dalam keadaan darurat seperti ketika terjadinya bencana alam Tsunami Aceh (2004), gempa di Nias (2005), dan gempa Yogyakarta dan Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan bantuan perbaikan gizi di beberapa daerah di Indonesia yang berakhir pada tahun 2011.¹² Bantuan WFP tidak hanya berupa bantuan mengatasi masalah pangan dan bencana dengan bantuan secara langsung saja, tapi WFP juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan memberi bantuan teknis dalam memperkuat ketahanan pangan, seperti kerja sama membuat Peta Ketahanan Pangan yang sudah berlangsung dari tahun 2002.¹³

Mulai pada tahun 2012 WFP menghentikan bantuan secara langsung di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari membaiknya perekonomian Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai negara dengan penghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah, sehingga mampu mengurangi jumlah persentase masyarakat Indonesia yang hidup dalam kelaparan dan kemiskinan yang ekstrem. Hasil dari review strategis food security dan evaluasi portofolio nasional Indonesia, WFP memutuskan untuk menghentikan distribusi pangan secara langsung dan lebih berfokus pada bantuan membuat kebijakan, peningkatan kapasitas pemerintah dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan dan nutrisi, serta memberikan pelatihan untuk mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan

¹² WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)
(<https://www.kemlu.go.id/rome/id/arsip/lembar-informasi/Pages/WORLD-FOOD-PROGRAMME-WFP.aspx>, di akses 21 September 2018)

¹³ Badan Ketahanan Pangan dan WFP Tingkatkan Kerjasama Atasi Kemiskinan dan Kerawanan Pangan (bkp.pertanian.go.id/berita-848-badan-ketahanan-pangan-dan-wfp-tingkatkan-kerjasama-atasi-kemiskinan-dan-kerawanan-pangan.html, di akses 22 September 2018)

dan nutrisi serta persiapan kondisi bencana. Jika saat Indonesia berstatus sebagai negara dengan penghasilan rendah bantuan WFP lebih banyak dalam bentuk bantuan langsung, maka saat status Indonesia membaik menjadi negara berpenghasilan menengah, bantuan WFP berubah lebih ke arah menjadi partner pemerintah Indonesia sehingga bantuan yang diberikan merupakan bantuan teknis yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan gizi Indonesia, program bantuan pengembangan ini dinamakan Indonesia Country Program (ICP). Program ICP sangat sesuai dengan fokus Rencana pembangunan jangka menengah Nasional pemerintah Indonesia tahun 2015-2019 yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan nutrisi, yang mana kedaulatan pangan dan peningkatan nutrisi dapat diwujudkan apabila pemerintah Indonesia memiliki kapasitas untuk :¹⁴

- Menangani permasalahan malnutrisi
- Mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim
- Memiliki penanganan kemampuan pasca bencana

Program ICP pertama dimulai tahun 2012 dan berakhir tahun 2015, yang memiliki tiga program utama yaitu analisis, memetakan, memonitor kedaulatan pangan, kemudian program manajemen pengendalian risiko bencana, dan program jaring pengaman sosial/gizi. Program ICP dari WFP di dasarkan dari *review* strategis lembaga penelitian nasional, serta masukan-masukan dari berbagai unsur berkepentingan seperti pemerintah, masyarakat, sektor privat dan lembaga partner WFP. Program ICP periode kedua yang sedang berjalan di mulai pada tahun 2016

¹⁴ WFP Indonesia profile (<https://www.wfp.org/content/wfp-indonesia-profile-bahasa-indonesia>, di akses 24 September 2018)

dan akan berakhir pada tahun 2020. ICP 2016-2020 memiliki program diantara lain, program untuk mendukung pemerintah dalam mengumpulkan dan menganalisis data ketahanan pangan dan gizi sebagai dasar pembuat kebijakan pemerintah, program mempromosikan gaya makan sehat untuk mengatasi kelaparan dan obesitas, dan program pembuatan jaringan logistik terpadu untuk menghadapi keadaan darurat.¹⁵

Aktivitas WFP sebagai mitra pemerintah Indonesia tidak hanya dengan tujuan WFP untuk mewujudkan *Zero Hunger* 2030, tetapi tetapi ICP juga bisa membantu mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia yakni mencapai kedaulatan pangan pada tahun 2019. Melalui ICP, WFP diharapkan mampu membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan pangan, malnutrisi, mempromosikan pertanian berkelanjutan di Indonesia, sehingga mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Oleh karena itu penting dianalisis aktivitas WFP melalui program ICP dalam membantu mewujudkan kedaulatan di Indonesia pada tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Pangan merupakan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus terpenuhi dalam kondisi apa pun. Namun Indonesia yang merupakan negara agraris masih tetap mengalami permasalahan pangan setiap tahunnya mulai dari kelaparan, malnutrisi dan rawan pangan. Untuk mengatasi permasalahan pangan pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan kedaulatan pangan dengan berbagai cara, keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dapat terlihat

¹⁵ *Indonesia Country Programme* (2016-2020) (www1.wfp.org/operations/200914-indonesia-country-programme-2016-2020, di akses 27 September 2018)

dari dikeluarkannya peraturan pemerintah, undang-undang, menjadi bagian program nawacita pemerintah serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia 2015-2019.¹⁶

Upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan mendapat dukungan dari WFP yang merupakan Organisasi Internasional di bidang pangan. kedaulatan pangan yang ingin diwujudkan Indonesia sesuai dengan tujuan WFP dalam mewujudkan *Zero Hunger* 2030 yang merupakan SDGs no.2. Dukungan yang diberikan WFP berbentuk program pengembangan yang disebut *Indonesia Country Program*, dimana posisi WFP bukan sebagai pemberi bantuan langsung melainkan sebagai partner dari pemerintah Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas aktivitas WFP dalam membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia tahun 2019.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana penjelasan yang telah di utarakan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka pertanyaan yang menjadi dasar dalam pengembangan penelitian bagi peneliti adalah : “*Bagaimana Aktivitas WFP dalam Membantu Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia Melalui Indonesia Country Programme 2016-2020*”

¹⁶ Syahyuti, dkk, *KEDAULATAN PANGAN SEBAGAI BASIS UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL*, hlm 99

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas dari WFP dalam membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia tahun 2019 melalui *Indonesia Country Programme*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Agar penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan organisasi internasional.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat internasional dalam persoalan mengenai kedaulatan pangan.
3. Manfaat bagi penulis sendiri yaitu berguna untuk memperluas wawasan dan mempertajam analisa dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya bidang organisasi internasional.

1.6 Studi Pustaka

Tinjauan pustaka sebagaimana berikut, akan menampilkan beberapa tulisan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sekiranya dapat mendukung peneliti dalam mengembangkan penelitian ini. Secara umum, peneliti menampilkan tinjauan pustaka berdasarkan penelitian sebelumnya terkait topik yang peneliti bahas.

Pertama, peneliti menggunakan buku dari John D. Shaw, yang berjudul *The UN World Food Programme and the Development of Food Aid*.¹⁷ Dalam buku ini Shaw menjelaskan mengenai sejarah perkembangan WFP sebagai Organisasi Internasional di bidang pangan, mulai dari awalnya hanya sebagai organisasi yang hanya bertugas memberikan bantuan pangan ketika bencana (*Food Aid*) hingga berkembang menjadi organisasi yang juga memberikan pendampingan pangan (*Food Assistance*). Tulisan dari Shaw ini digunakan sebagai penunjang penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis sejarah dan perkembangan WFP sebagai organisasi di bidang pangan. Buku dari Shaw berfokus pada perkembangan WFP secara global, sedangkan peneliti berfokus pada perkembangan aktivitas WFP di Indonesia.

Kedua, peneliti menggunakan artikel jurnal dari Syahyuti dkk. Yang berjudul *Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*.¹⁸ Pada tulisan ini Syahyuti dkk. Menjelaskan bagaimana konsep tentang kedaulatan pangan berkembang di Indonesia serta upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana ada perbedaan pendapat mengenai memaknakan kedaulatan pangan, namun Syahyuti dkk. memandang kedaulatan pangan merupakan sebuah proses yang harus di lalui untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional Indonesia. Tulisan dari Syahyuti dkk. ini akan penulis jadikan tulisan penunjang untuk menganalisis dan mengumpulkan data sehingga penulis mampu memahami tentang bagaimana kedaulatan pangan yang yang ingin di

¹⁷ D. John Shaw, *The UN World Food Programme and The Development of Food Aid*, New York: Palgrave, 2001

¹⁸ Syahyuti, dkk Syahyuti, dkk, *Kedaulatan Pangan Sebagai Basis untuk Mewujudkan Ketahanan pangan Nasional*. Forum Penelitian Agro ekonomi, Vol. 33 No. 2, Desember 2015: 95–109

capai oleh pemerintah Indonesia. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti lebih berfokus pada aktivitas WFP dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Ketiga, peneliti menggunakan artikel jurnal dari Sulistya yang berjudul *Dari Ketahanan Pangan Menuju Kedaulatan Pangan*.¹⁹ Pada tulisan ini Sulistya menjelaskan mengenai kondisi kerawanan pangan yang terjadi di Indonesia dan bagaimana pemerintah Indonesia berupaya melakukan perubahan paradigma di Indonesia dari awalnya ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. Jika di jurnal ini Sulistya ini menganalisis upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan Pangan, peneliti lebih berfokus terhadap bantuan aktivitas WFP dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Keempat, peneliti menggunakan artikel jurnal dari Sara Pantuliano yang berjudul *From food aid to livelihoods support: rethinking the role of WFP in eastern Sudan*.²⁰ Pada tulisan ini Sara Pantuliano membahas tentang aktivitas WFP dalam memberikan bantuan di negara Sudan bagian timur dari proses bantuan kondidi darurat dalam waktu yang cukup panjang, bantuan langsung yang diberikan oleh WFP adalah pemberian *Food Aid* terhadap pengungsi di Sudan timur, namun pemberian bantuan memberikan dampak negatif berupa ketergantungan masyarakat terhadap *Food Aid* sehingga memperlambat proses *recovery* di wilayah Sudan Timur.

¹⁹ Sulistiya, *Dari Ketahanan Pangan Menuju kedaulatan pangan: FROM FOOD SECURITY TO FOOD SOVEREIGNTY*, (Agros Vol.14 No.1 Januari 2012: 125-132)

²⁰ Sara Pantuliano, *From food aid to livelihoods support: rethinking the role of WFP in eastern Sudan*, Overseas Development Institute, (Disasters, Vol.31 maret 2007, hlm. s77-s90)

Dengan kondisi yang terjadi di Sudan timur, WFP berupaya merubah pola bantuan dari *Food Aid* menjadi *Food Assistance*. Tulisan dari Sara Pantuliano ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti sedang kerjakan, yakni dari sisi aktivitas bantuan WFP di Sudan Timur dan di Indonesia. Namun perbedaan penelitian terdapat di jurnal Sara Pantuliano yang menganalisis tentang efektivitas program bantuan WFP, sedangkan peneliti lebih kepada menganalisis aktivitas dari WFP.

Kelima, Peneliti Menggunakan tesis dari Madeleine Fairbairn yang berjudul *Framing Resistance : International Food Regimes and The Roots of Food sovereignty*.²¹ Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana kedaulatan pangan merupakan solusi bagi permasalahan pangan dunia, dibanding sistem pangan pada ketahanan pangan yang lebih di dominasi oleh ideologi politik dan ekonomi. Dimana kedaulatan pangan lebih menitik beratkan kendali pasar berada di tingkat lokal maupun nasional. Pada tesis ini Madeleine berfokus bagaimana kedaulatan pangan merupakan penyempurnaan dari konsep ketahanan Pangan, sedangkan peneliti lebih berfokus bagaimana aktivitas sebuah organisasi Internasional dalam membantu mewujudkan kedaulatan pangan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Food Sovereignty

Berdasarkan *La Vía Campesina*, *Food Sovereignty* adalah hak setiap bangsa untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas diri untuk menghasilkan makanan pokok secara mandiri dan sesuai dengan budaya dan

²¹ Madeleine Fairbairn, Tesis, : "*Framing Resistance : International Food Regimes and The Roots of Food sovereignty*", (Madison: University of Winconsin, 2008)

keberagaman yang ada, Setiap orang (petani) berhak untuk menghasilkan makanan secara mandiri di lahan milik pribadi, kedaulatan pangan prasyarat untuk mencapai ketahanan pangan yang sebenarnya.²²

Pada tahun 1992 konsep kedaulatan pangan diprakarsai oleh para petani dari berbagai penjuru dunia yang saat merasa kecewa dengan industrialisasi produk tani demi mewujudkan ketahanan pangan yang tidak relevan terhadap para petani, sehingga kebijakan kebijakan yang muncul malah merugikan para petani. Konsep ketahanan pangan di anggap hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan pangan, tanpa memikirkan dari mana dan bagaimana proses makanan tersebut di dapat, sehingga mengabaikan aspek-aspek lain seperti kesejahteraan petani kecil, produksi pangan yang ramah lingkungan dan ramah budaya.²³ Pada tahun 1996 di konferensi internasional *Via Campesina* di Mexico para petani memutuskan perlunya konsep kedaulatan pangan, dimana hak setiap individu atas akses pangan yang sehat dan tepat secara budaya yang dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri.²⁴

Kedaulatan pangan dianggap sebagai bentuk penyempurnaan bagi *food security* yang dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan kepentingan petani dan kebutuhan hasil pangan yang ramah lingkungan dan ramah budaya. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebuah negara harus memenuhi Enam Prinsip kedaulatan pangan:

²² Via Campesina, 1996

²³ Wittman dkk., Food Sovereignty "Reconnecting Food, Nature and Community", Pambazuka Press, 2011, hlm2-4

²⁴ Via Campesina, 1996

1. *Focusses on Food for People*

Prinsip dimana terpenuhinya akan kebutuhan pangan yang sehat dan cocok secara budaya bagi setiap individu maupun komunitas, termasuk mereka yang berada di wilayah konflik dan kelompok ter marginalkan. Dalam kedaulatan pangan, pangan tidak hanya menjadi komoditas agribisnis internasional,²⁵

2. *Values Food providers*

Nilai-nilai kedaulatan pangan mendukung dan menghormati hak setiap pihak yang terlibat dalam produksi pangan, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, pekerja di bidang pertanian dan perikanan, masyarakat adat, dan pengolah makanan. kedaulatan pangan menolak setiap kebijakan, program maupun yang tindakan yang mengancam sumber penghidupan setiap pihak.

3. *Localizes Food System*

kedaulatan pangan membuat pihak penyedia pangan dan konsumen berperan aktif dalam pembuatan kebijakan tentang pangan, sehingga penyedia pangan dan konsumen bisa melindungi kepentingan mereka masing-masing dari beredarnya produk *dumping* pasar lokal, pangan

²⁵ The 6 Food Sovereignty Principles, Forum For Food Sovereignty, 2007, Grassroot International (grassrootsonline.org/sites/default/files/The-6-Food-Sovereignty-Principles.pdf)

tidak sehat, pangan dengan kualitas buruk, dan peraturan dari pihak pemerintah yang menguntungkan perusahaan pertanian yang besar.

4. *Makes Decisions Locally*

Kedaulatan pangan mampu memberikan kontrol bagi penyedia pangan terhadap penggunaan sumber daya pangan seperti air, lahan, bibit, sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. kedaulatan pangan juga menolak privatisasi sumber daya pangan dalam bentuk apa pun.

5. *Builds Knowledge and Skills*

Kedaulatan pangan mampu membuat penyedia pangan memiliki pengetahuan dan skill, dalam proses produksi pangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta sesuai dengan kebudayaan lokal untuk di teruskan ke generasi mendatang.

6. *Works with nature*

Kedaulatan pangan menggunakan sistem produksi pangan yang ramah lingkungan, sehingga bisa berkontribusi dalam memperbaiki ekosistem bumi.²⁶

Berdasarkan kepada enam prinsip kedaulatan pangan ini lah, nantinya peneliti akan menganalisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan WFP dalam membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

²⁶ The 6 Food Sovereignty Principles, Forum For Food Sovereignty, 2007, Grassroot International (grassrootsonline.org/sites/default/files/The-6-Food-Sovereignty-Principles.pdf)

1.8 Metodologi Penelitian

Berdasarkan dengan pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti melalui penelitian ini, maka peneliti menggunakan akan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana hasil penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau berbentuk angka, tabel dan sejenisnya. Metode kualitatif memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif, hal ini disebabkan karena metode kualitatif menekankan pada pencarian makna di balik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial akan tercapai.²⁷

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁸ Sehingga jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang berfungsi untuk mendeskripsikan aktivitas WFP sebagai suatu organisasi internasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia melalui ICP 2016-2020.

²⁷Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992), 15

²⁸ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *“Qualitative Research For Education : An Introduction to Theories and Methods”*, Second Edition. 1992

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tepat sasaran dan tidak melebar, penulis memberikan batasan penelitian pada aktivitas yang dilakukan WFP Untuk membantu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia melalui program ICP yang berlangsung dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Meskipun demikian peneliti masih memungkinkan untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan untuk mendukung penelitian.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan diteliti, atau bisa juga disebut sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel yang dapat memengaruhi perilaku dari variabel dependen adalah variabel Independen yang disebut juga sebagai unit eksplanasi.²⁹ Berdasarkan pengertian variabel dependen dan variabel independen di atas maka dapat dipahami bahwa unit analisis dari penelitian ini adalah WFP, sedangkan unit eksplanasinya adalah kedaulatan pangan Indonesia.

Tingkat atau level analisis merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti, terutama dalam politik internasional. terdapat lima level analisis dalam melakukan penelitian, yaitu individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara

²⁹ Mohtar Mas' oed, "*Ilmu hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*"(Pusat Antar Universitas- Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LPE),108.

dan sistem internasional.³⁰ Berdasarkan konteks penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa level analisis yang peneliti gunakan adalah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi literatur atau studi pustaka melalui buku-buku, jurnal, dokumen. Dengan metode ini sumber data didapat penulis berasal dari buku ilmiah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik yang relevan dengan topik pembahasan dan penelitian, metodologis penelitian dan materi-materi yang mendukung penelitian. Sumber literatur yang digunakan yang digunakan adalah sumber yang berhubungan dengan aktivitas WFP dalam menangani permasalahan pangan dan sumber yang berhubungan dengan kedaulatan pangan di Indonesia.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data yang ada, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, men sintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari didalam data, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.³¹ Dalam mengolah data, penulis memilih informasi yang didapatkan dengan seksama dan memilih sumber-sumber relevan yang dapat menjelaskan permasalahan yang peneliti angkat. Setelah mendapatkan data yang relevan, melalui prosedur kualitatif, data-

³⁰ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, hlm 55

³¹ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, hlm 58

data tersebut kemudian dianalisis, ditetapkan, diuraikan dan didokumentasikan, hal ini dilakukan agar alur konteks-konteks di dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rinciannya untuk menilai ide, makna tertentu yang terkandung didalamnya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan

BAB II WFP Sebagai Organisasi Internasional di Bidang Pangan

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang WFP sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan pangan dari sejarah, tugas dan aktivitas yang dilakukan WFP.

BAB III Kedaulatan Pangan Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kedaulatan pangan di Indonesia, baik dari segi sejarah maupun aktivitas yang dilakukan untuk mencapai kedaulatan pangan.

BAB IV Indonesia Country Programe 2016-2020 mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia.

Pada bab ini merupakan analisis dari aktivitas yang dilakukan WFP melalui ICP 2016-2020 dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini nantinya akan membahas hasil terpenting dari penelitian ini, yaitu kesimpulan, saran, dan kontribusi yang didapat dari penelitian ini.

